

SKRIPSI

KEKUATAN *SMART CONTRACT* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PENGADILAN MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

Oleh:



Pembimbing :

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.
Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

No.Reg : 45/PK-II/VI/2025

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 29 April 2003 b. Nama Orang tua : Hazali Leni Marlina c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 2110112183	f. Tanggal Lulus : 27 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,84 j. Alamat : Komplek Rindang Alam No.37, RT01/ RW03, Koto Luar, Pauh Padang	

KEKUATAN SMART CONTRACT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PENGADILAN MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

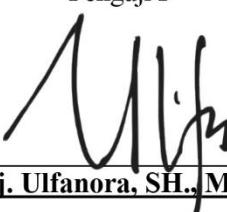
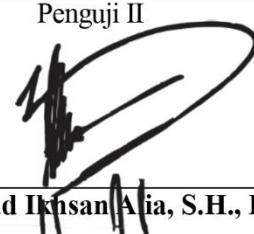
*(Khairun Natijah, 2110112183, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 107 Halaman, 2025)*

ABSTRAK

Indonesia mulai mengadopsi teknologi blockchain dan smart contract, namun penerapannya dalam sistem hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Alat bukti elektronik diakui secara hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Smart contract berbasis teknologi blockchain menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan kontrak konvensional, dengan kemampuan mengeksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah disepakati tanpa keterlibatan pihak ketiga. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana keabsahan smart contract dalam konteks penggunaan teknologi blockchain sebagai perjanjian menurut KUHPerdats?, 2. Apakah smart contract dalam konteks penggunaan teknologi blockchain sebagai alat bukti elektronik yang sah di pengadilan menurut sistem hukum acara perdata di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat dilihat ketentuan ini masih menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme pembuktian smart contract dalam konteks blockchain, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Regulasi harus mampu mengakomodasi kompleksitas teknologi tanpa mengurangi kepastian hukum.

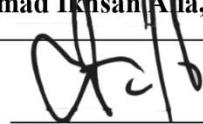
Kata Kunci : Pembuktian, Smart contract, KUHPer, Alat Bukti.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Pengaji dan dinyatakan lulus pada 27 Agustus 2025. Pengaji,

Tanda Tangan	Pengaji I 	Pengaji II 
Khairun Natijah	Hj. Ulfanora, SH., MH.	Muhammad Ihsan Alia, S.H., LLM

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



No. Alumni University	Student Name: Khairun Natijah		No. Faculty Alumni
a. Place/Date of Birth	: Padang, 29 th April 2003	f. Graduation Date	: 27 th June 2025
b. Parent's Name	: Hazali Leni Marlina	g. Predicate	: Cumlaude
c. Faculty	: Law	h. Study Time	: 4 Years
d. Concentration	: Business Civil Law	i. GPA	: 3,84
e. No. BP	: 2110112183	j. Address	: Komplek Rindang Alam No.37, RT01/ RW03, KotoLuar, Pauh, Padang

**THE POWER OF SMART CONTRACTS AS ELECTRONIC EVIDENCE IN COURT
ACCORDING TO THE INDONESIAN CIVIL LAW SYSTEM**
*(Khairun Natijah, 2110112183, Business Civil Law, Faculty of Law,
Andalas University, 107 Pages, 2025)*

ABSTRACT

Indonesia has begun to adopt blockchain and smart contract technology, but its application in the legal system still faces various challenges. Electronic evidence is legally recognized in Article 5 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008, which states that electronic information and/or electronic documents are valid evidence. Blockchain-based smart contracts offer greater efficiency, transparency, and security compared to conventional contracts, with the ability to execute automatically based on agreed conditions without the involvement of third parties. The problems discussed in this thesis are: 1. How valid are smart contracts in the context of using blockchain technology as an agreement according to the Civil Code? 2. Are smart contracts in the context of using blockchain technology as valid electronic evidence in court according to the civil procedural law system in Indonesia? The research method used is normative juridical, using a legislative approach and descriptive analysis. From the results of the study, it can be seen that this provision still causes a legal vacuum regarding the mechanism of proving smart contracts in the context of blockchain. Comprehensive regulatory updates and adaptation to technological developments are needed. Regulations must be able to accommodate the complexity of technology without reducing legal certainty.

Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: Evidence, Smart contract, Civil Code, Evidence.

This Minor Thesis has defended in front of the examiner team at August 27th, 2025.

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II
Khairun Natijah	<u>Hj. Ulfanora, SH., MH.</u>	Muhammad Ikhwan Alia, S.H., LLM

Acquainted,

Head of the Department of State Administration Law: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**

Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:
